

Semua Kandidat Ketua KPK Bermasalah

Pilihan atas calon Ketua KPK menjadi sangat terbatas. Sebanyak 28 masalah ditemukan dalam rekam jejak mereka.

Edy Asrina Putra

REKAM jejak seluruh kandidat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diinvestigasi secara khusus oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam rentang waktu 13 hari, yakni mulai 3 hingga 15 Agustus 2010.

Hasilnya, menurut peneliti ICW Donal Fariz, seluruh kandidat Ketua KPK terindikasi bermasalah. Ada tiga aspek yang menjadi acuan dalam investigasi tersebut.

"Yakni, aspek kepemimpinan, integritas, dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Dan kami menemukan, semua kandidat punya problem masing-masing," ungkapnya, dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Bahkan, Donal memaparkan, ada tiga kandidat yang memiliki masalah terkait dengan ketiga aspek sekaligus. Banyaknya masalah yang ditemukan dalam rekam jejak para kandidat Ketua KPK itu disayangkan oleh Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin.

Lukman mengingatkan, kini langkah yang bisa dilakukan hanya tinggal memilih mana di antara calon-calon itu yang

masalahnya masih bisa diterima. "Sayangnya, dari ketujuh calon itu tidak ada yang sempurna. Semuanya bermasalah apakah itu soal *leadership*, integritas, maupun komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Karena pada akhirnya



Lukman Hakim Saifudin
Wakil Ketua MPR

dihadapkan dengan pilihan. Maka, kita harus melihat mana yang tingkat destruktifnya lebih ringan, itulah yang harus kita pilih," tuturnya.

Faktor yang tersisa

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menandakan, proses pemilihan pimpinan KPK dan figur Ketua KPK merupakan satu-satunya faktor tersisa yang diharapkan dapat membangkitkan serta memulihkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap komitmen penegakan hukum di negara ini.

"Lantaran itulah, jika proses pemilihan diwarnai intervensi sehingga terpilih figur Ketua KPK titipan penguasa, kita akan gagal mewujudkan Indonesia negara hukum."

Dalam situasi itu, Bambang mengatakan, peran dan independensi Pansel Ketua KPK menjadi sangat menentukan. Dia pun berharap, pansel mampu menolak berbagai intervensi yang muncul dan memilih calon Ketua KPK sesuai nurani dan harapan rakyat.

Bambang mengingatkan, akan ada risiko yang sangat besar jika Pansel Ketua KPK berkolusi dengan penguasa dalam mengajukan calon. Risiko pertama, kata dia, bakal datang dari DPR.

"Bentuknya penolakan DPR yang akan memperpanjang kondisi vakum kepemimpinan KPK. Adapun risiko kedua, jika DPR pun gagal menghalau intervensi karena mekanisme pemilihan harus melalui voting," tandasnya.

Bambang mengaku harus menggarisbawahi hal tersebut karena sudah muncul pergunjingan bahwa Pansel Ketua KPK akan mengajukan dua nama yang difavoritkan oleh penguasa. (* /S-8)

edy@mediaindonesia.com

7 Nama Calon yang Lolos Tahap 3

1. Bambang Widjojanto (advokat dan pendiri ICW)
2. Chaerul Rasjid (pensiunan Polri)
3. Fachmi (jaksa aktif)
4. I Wayan Sudirta (anggota DPD dan pendiri BCW)
5. Jimly Asshiddiqie (anggota Wantimpres dan mantan Ketua MK)
6. Melli Darsa (pengacara)
7. Muhammad Busyro Muqoddas (Ketua Komisi Yudisial)

3 Aspek Penilaian

- Kepemimpinan (*leadership*)
- Integritas (*integrity*)
- Komitmen (*commitment*)

28 Masalah Hasil Rekam Jejak antara lain:

Aspek Kepemimpinan, 6 kasus

1. Belum berpengalaman memimpin suatu lembaga besar
2. Diragukan kepemimpinan dan kenegarawanan

Aspek Integritas, 12 kasus

1. Tidak patuh pajak
2. Penyalahgunaan jabatan
3. Memiliki biaya hidup tinggi

Aspek komitmen, 10 kasus

1. Mencoba menghentikan kasus korupsi
2. Melindungi tersangka kasus korupsi
3. Nepotisme

Keterangan :
ICW : Indonesia Corruption Watch
BCW : Bali Corruption Watch
MK : Mahkamah Konstitusi

Sumber: Tim MW Graffis: CAKSONO

DINAMIKA

Adem Ayem Seleksi Pengawas Hakim

BERBEDA dengan seleksi Ketua KPK yang terkesan inggar-bingar oleh komentar pro dan kontra, pelaksanaan seleksi anggota Komisi Yudisial justru terlihat adem ayem. Ujian tertulis yang dipusatkan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat, Sabtu (14/8), itu bahkan nyaris luput dari perhatian publik. Ketua Pansel KY Harkristuti Harkrisnowo mengatakan ujian itu berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00. Peserta ujian terdiri dari 171 orang dari total 190 yang lolos tes administratif. Sebanyak 18 orang di antaranya tak hadir tanpa keterangan dan satu orang lainnya, yakni Wakil Wali Kota Semarang Mahfudz Ali, mundur karena ingin fokus dalam seleksi anggota Ombudsman. "Mereka diminta membuat makalah seputar KY. Kita beri tiga pilihan makalah, yakni soal peran KY dalam peradilan, hubungan kelembagaan antara MA dan KY, serta mewujudkan pengawasan dan seleksi hakim yang kredibel," katanya di sela-sela pertemuan pleno. Kriteria kelulusan makalah, menurut Harkristuti, dinilai dari pengetahuan dan kepedulian para calon terhadap peradilan ini. Makalah mereka, sambung dia, juga harus menggambarkan peluang dan tantangan yang dihadapi KY serta strategi untuk mengatasinya ke depan. (Din/S-8)

Kado dari Istana untuk Franky Sahilatua

SIMPATI yang diberikan publik kepada penyanyi balada Franky Sahilatua yang tengah menjalani pengobatan di Singapura memang cukup mengejutkan. Di antara banjir perhatian tersebut, salah satunya datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah seorang Asisten Staf Khusus Presiden, Akuat Supriyanto, Sabtu (14/8), datang langsung membesuk Franky yang terbaring di rumah sakit akibat penyakit kanker dan tumor tulang sumsum. Dia membawa surat yang ditulis khusus Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief. Dalam surat itu, disampaikan harapan Presiden agar penyanyi asal Surabaya itu segera sembuh karena, tertulis di surat itu, Franky kerap memberikan kritik positif yang menginspirasi pemerintah untuk lebih memahami dinamika publik. "Bung Franky berterima kasih atas perhatian Presiden. Dia juga mengingatkan gagasan lamanya agar Presiden dapat menjadi bapak kemakmuran rakyat, bukan bapak pembangunan. Franky mengatakan pembangunan hanya titik tolak. Tujuan akhirnya kemakmuran. Pembangunan tanpa visi kemakmuran hanya akan menjadi *project oriented*. "Paradigma itu yang menurut dia harus dipegang semua anggota kabinet." (* /S-8)

Perempuan Dongkrak Citra Positif KPK

SEBAGAI satu-satunya perempuan yang bertarung dalam seleksi calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), advokat Melli Darsa justru emoh diistimewakan. Namun nyatanya, nama Melli mampu tetap berkibar hingga tahap ketiga seleksi tersebut.

Melli mengaku sejatinya dirinya tidak terlampaui berharap kelak menduduki posisi bergengsi tersebut. Kendati begitu, dia mengimbau pemerintah agar tidak pernah membiarkan Ketua KPK mendatang berjalan sendirian dalam menumpas aksi para koruptor. "Tapi itu bukan berarti saya tidak serius sebagai calon," imbuhnya. Dalam wawancara khusus

yang dilakukan wartawan *Media Indonesia*, Sabtu (14/8), pemilik *law firm* Melli Darsa & Co yang berkantor di Menara Standard Chartered itu kerap menekankan bahwa sejak awal pencalonan dirinya bukan masalah cari jabatan. Melainkan, ia ingin mengekspresikan keprihatinan dan juga kontribusi pada proses itu sendiri.

Bagaimana perasaan Anda lolos tahap ketiga seleksi Ketua KPK?

Sejujurnya senang. Tapi saya juga merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai satu-satunya kandidat wanita dalam memberi kontribusi positif pada proses. Selain itu

juga membuka wawasan yang berbeda bagi masyarakat dalam memandang masalah pemberantasan korupsi serta upaya penegakan negara hukum yang kukuh, berwibawa, dan bebas dari korupsi di negeri ini.

Apa yang Anda harapkan ke depannya dari pemilihan itu?

Saya harapkan dari panitia seleksi (pansel), Presiden, dan DPR benar-benar melihat ini sebagai momentum penting bagi masa depan KPK. Mereka selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif harus punya terobosan agar momentum ini tidak jadi sia-sia belaka. Sebab, ini bukan 'sekadar' memilih seorang ketua yang terbaik. Baik pansel, Presiden, mau-

pun DPR harus menjawab pertanyaan yang lebih strategis. Yakni, tentang sejauh mana kita sebagai bangsa dan negara masih bertekad menjadi negara hukum yang bebas dari pencemaran korupsi.

Pemilihan pimpinan KPK hanya merupakan satu langkah dari beberapa langkah pokok lainnya. Khususnya, pemberantasan korupsi serta pemberdayaan atas lembaga penegak hukum dan pilar utama negara hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, juga lembaga pemasyarakatan.

Apa yang Anda tawarkan bagi KPK mendatang?

Hal paling baik yang dapat diharapkan dari seorang Ketua

KPK adalah memperbaiki dan memperkuat citra KPK sebagai lembaga yang benar-benar bersih, independen, dan berani memegang amanah UU Tipikor secara konsekuen dan tanpa pandang bulu. Tapi untuk itu, KPK harus didukung aparat kepolisian dan kejaksaan yang juga bersih dan punya visi sama tentang pemberantasan korupsi.

Kepemimpinan di kepolisian dan kejaksaan juga harus diisi oleh pihak yang punya semangat antikorupsi yang sama dengan pimpinan KPK yang diangkat-termasuk untuk membersihkan korupsi dari tubuhnya sendiri.

Apakah Anda berniat memberi nuansa sentuhan perempuan di KPK?

Sebenarnya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut profesionalisme. Walau begitu, dari sudut citra, menurut saya, keberadaan perempuan di tubuh KPK akan berdampak positif dan memberi gambaran yang lebih tepat tentang kepedulian perempuan atas masalah korupsi.

Selain itu, juga untuk menepis anggapan bahwa perempuan merupakan pelaku utama tipikor. (* /S-8)



Melli Darsa
Advokat

Segenap Komisaris, Direksi dan Karyawan
PT Bank Central Asia Tbk
mengucapkan

Dirgahayu Republik Indonesia